

PENDIDIKAN PANCASILA

Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa

PENDIDIKAN PANCASILA

Nilai Dasar dan Jati Diri Bangsa

Penulis:

Wasiyem, S.Pd., M.Si.

Ramadhani, M.Pd.

Editor:

Dr. Muhammad Kaulan Karima, M.Pd.



Wasiyem, S.Pd., M.Si., dan Ramadhani, M.Pd.

Pendidikan Pancasila: Nilai Dasar dan Jati Diri/Wasiyem, S.Pd., M.Si., dan Ramadhani, M.Pd.

—Ed. 1, Cet. 1. —Medan: Merdeka Kreasi, 2021

xii, 170 hlm., 25 cm.

Bibliografi: hlm. 161

ISBN 978-623-6198-15-5

Hak Cipta © 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.

Wasiyem, S.Pd., M.Si., dan Ramadhani, M.Pd.

Pendidikan Pancasila: Nilai Dasar dan Jati Diri

Cetakan ke-1, September 2021

Hak penerbitan pada CV. Merdeka Kreasi Group

Editor : Dr. Muhammad Kaulan Karima, M.Pd.

Layout : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Desain Cover : Tim Kreatif Merdeka Kreasi

Dicetak di Merdeka Kreasi Group

CV. Merdeka Kreasi Group

Anggota IKAPI No. 148/SUT/2021

Alamat : Jl. Gagak Hitam, Komplek Bumi Seroja Permai Villa 18,
Medan Sunggal 20128

Telepon : 061 8086 7977

Email : merdekakreasi2019@gmail.com

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	v
Kata Sambutan Dekan FKM UIN Sumatera Utara Medan	vii
Kata Sambutan Dekan FITK UIN Sumatera Utara Medan	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendidikan Pancasila dapat Mengatasi Masalah Bangsa	1
B. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila	3
C. Tantangan Pendidikan Pancasila	4
BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, DAN SUMBER Pendidikan Pancasila	11
A. Pengertian Pendidikan Pancasila	11
1. Pengertian secara Etimologis (Harfiah)	11
2. Pengertian Pancasila Secara Historis	13
3. Pengertian Pancasila secara Terminologis	19
B. Tujuan Pendidikan Pancasila	22
C. Sumber Pendidikan Pancasila (Historis, Sosiologis, dan Yuridis)	25
1. Sumber Historis Pendidikan Pancasila	25
2. Sumber Pancasila secara Sosiologis	28
3. Sumber Pancasila secara Yuridis	30
BAB III PANCASILA DALAM SEJARAH BANGSA INDONESIA	32
A. Sejarah Pengusulan, Perumusan, dan Pengesahan Pancasila	32
B. Sejarah Muncul dan Berkembangnya Rasa Kebangsaan Indonesia	42
1. Periode Pra Kolonial	43
2. Periode Kolonial	45
3. Periode Pasca Kemerdekaan	50
C. Pentingnya Pancasila dalam Kajian Sejarah	53

BAB IV	PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA	
	REPUBLIK INDONESIA	56
	A. Pengertian dan Tujuan Negara	56
	1. Pengertian Negara	56
	2. Tujuan Negara	57
	B. Pentingnya Pancasila sebagai Dasar Negara	61
	C. Intisari Nilai dalam Sila Pancasila	65
	1. Ketuhanan Yang Maha Esa	66
	2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	68
	3. Persatuan Indonesia	70
	4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan	71
	5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	74
BAB V	PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	78
	A. Konsep Pancasila sebagai Ideologi Negara	78
	B. Pentingnya Pancasila sebagai Ideologi Negara	80
	C. Perbedaan Ideologi Pancasila dengan Ideologi Lainnya	83
BAB VI	PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH NEGARA	89
	A. Konsep Pancasila sebagai Falsafah Negara	89
	1. Pengertian Sistem	89
	2. Pengertian Filsafat	90
	3. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Bangsa dan Negara	93
	B. Pentingnya Pancasila sebagai Falsafah Negara	97
	C. Tantangan Pancasila sebagai Falsafah Negara	99
BAB VII	PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA	101
	A. Konsep Pancasila sebagai Sistem Etika	101
	1. Pengertian Etika	101
	2. Pancasila sebagai Sistem Etika	104
	B. Pentingnya Pancasila sebagai Sistem Etika	107
	C. Tantangan Pancasila sebagai Sistem Etika	111

BAB VIII	PANCASILA SEBAGAI NILAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI (IPTEK)	115
	A. Konsep Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan IPTEK	115
	1. Perkembangan Iptek Untuk Kesejahteraan Manusia	115
	2. Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan IPTEK	118
	B. Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan IPTEK	124
	C. Tantangan Pancasila Sebagai Nilai Dasar Pengembangan IPTEK	129
BAB IX	AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN, SUDAHKAH?	133
	A. Bidang Hukum	134
	B. Bidang Pendidikan	138
	C. Bidang Kesehatan	142
BAB X	PANDANGAN CENDIKIAWAN MUSLIM TENTANG PANCASILA	146
	A. Pandangan KH. Wahid Hasyim	147
	B. Pandangan Buya Hamka	148
	C. Pandangan KH. Abdurrahman Wahid	149
	D. Pandangan Nurcholis Madjid	152
	E. Pandangan Tokoh Muhammadiyah	155
DAFTAR PUSTAKA	161
TENTANG PENULIS	167
TENTANG EDITOR	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendidikan Pancasila dapat Mengatasi Masalah Bangsa

Data yang diperoleh dari Transparency International (TI) tahun 2015 bahwa Negara Indonesia berada pada posisi 88 dari 188 negara paling korup di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pejabat negara yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila masih banyak ditemukan di Republik Indonesia ini.

Masalah lain yang dihadapi di Negara Indonesia ini adalah disintegrasi atau terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Disintegrasi menjadi salah satu permasalahan sosial menakutkan bagi segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman akan unsur budaya, arti suku, politik, dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Disintegrasi menjadi ancaman dalam pembangunan skala nasional, lantaran setiap orang memiliki komitmen tersendiri dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh saat pemilihan presiden tahun 2019 rakyat rakyat terpecah belah, saling hujat menghujat, saling menghina bahkan terdapat kata yang sudah terlabel yaitu Cebong vs Kampret, entah dari mana istilah ini bisa lahir begitu saja, padahal kata ini menunjukkan objeknya adalah “binatang” bukankah hal ini sangat buruk dan hina? Permusuhan antara pendukung merambah sampai ke tingkat masyarakat bawah, bahkan diduga juga terjadi perpecahan dalam kalangan keluarga. Hal lain yang terjadi adanya fenomena primordialisme yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kali disaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Misalnya egara di Poso, di Aceh Singkil, ataupun terjadi di Papua, dengan perbedaan agama tanpa mengendepankan toleransi masyarakat saling menyerang satu sama lainnya.

Berdasarkan laporan hasil egara Badan Pusat Statistik di 181 Kabupaten/ Kota, 34 Provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Dailami, 2014).

Ditambahkan lagi tentang moralitas generasi bangsa Indonesia yang sangat memprihatinkan yang mengalami dekadensi moral. hal ini terjadi

disebabkan banyak faktor, bisa dari pengaruh paham kapitalisme, sekularisme, dan komunisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Disebabkan pula oleh tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media massa, baik cetak maupun elektronik. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga seringkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga. Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi.

Lain lagi pada masalah narkoba yang telah mejangkit keseluruhan lapisan masyarakat, baik pejabat, selebritis, rakyat biasa, serta dominasi generasi muda. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tahun 2013, POLRI mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh POLRI hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba (<http://nasional.sindonews.com/read/2013/12/27/13/821215/sepanjang2013-kasus-narkoba-meningkat>). Untuk itu, pendidikan Pancasila merupakan keniscayaan yang harus diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi.

Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib yang harus diajarkan di perguruan tinggi di Indonesia sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri. Sebagaimana yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, **pendidikan Pancasila**, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi atau menuntaskan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas.

Sebelumnya, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 914/E/T/2011, tertanggal 30 Juni 2011, ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 (dua) SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dengan bobot minimal 3 (tiga) SKS.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi, yang menegaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila diwajibkan dan harus berdiri sendiri yang harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak Negara, bukan kehendak perseorangan atau golongan, demi terwujudnya tujuan Negara.

Mata kuliah pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk membina pemahaman dan penghayatan mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia, yaitu sebagai ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa dalam mengembangkan jiwa profesionalitas mereka sesuai dengan bidang studi masing-masing.

Mahasiswa yang berkedudukan sebagai makhluk individu dan sosial, perlu menyadari bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya terkait dengan diri sendiri, tetapi juga berimplikasi dalam kehidupan sosial dan juga lingkungannya.

Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh (bukan anti ajaran atau nilai agama), memiliki integritas, dan berwawasan moral-akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui berbagai sikap yang positif, seperti: jujur, disiplin, tanggung jawab, dan konsisten pada kebenaran.

Mahasiswa sebagai warga akademis yang bermoral Pancasilais juga harus terlibat dan berkontribusi langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perwujudan sikap tanggung jawab warga negara. Tanggung jawab yang penting berupa sikap menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia.

Intinya, apabila pendidikan Pancasila dilaksanakan dengan baik dan konsisten, maka diharapkan permasalahan di atas dapat diminimalkan bahkan dapat dihilangkan dikemudian hari.

B. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila

Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).

Adapun visi dan misi mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebagai berikut: Visi Pendidikan Pancasila: “Terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.” Sedangkan Misi Pendidikan Pancasila yaitu:

1. Mengembangkan potensi akademik peserta didik (misi psikopedagogis).
2. Menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara (misi psikososial).
3. Membangun budaya ber-Pancasila sebagai salah satu determinan kehidupan (misi sosiokultural).
4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik (*synthetic discipline*), sebagai misi akademik (Sumber: Tim Dikti).

Ada kesan mahasiswa menganggap bahwa pendidikan Pancasila kurang penting, dikarenakan tidak relevan program studinya. Padahal, apabila dicermati secara seksama dengan menggunakan pikiran yang jernih dan hati terbuka, pendidikan Pancasila sangat diperlukan bagi mahasiswa dalam membentuk karakter yang profesional dan bermoral, dikarenakan tantangan perkembangan zaman membuat segala sesuatu berubah, terutama budaya, paham-paham. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila dimaksudkan agar bangsa Indonesia tetap sadar akan jati diri atau identitasnya sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Sebagaimana sesuai dengan visi dan misi pendidikan Pancasila di atas.

Walaupun di satu sisi Pancasila tetap layak untuk dikaji dan dipelajari kembali relevansinya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (Kaderi, 2015). Bagaimanapun kesepakatan bangsa telah menetapkan bahwa Pancasila dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Kesepakatan tersebut telah dinyatakan pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh sebuah Badan yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai lembaga yang membentuk Negara.

C. Tantangan Pendidikan Pancasila

Perjalanan Pendidikan Pancasila mengalami dinamika yang panjang dalam pengimplementasiannya. Apabila ditelusuri, upaya pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya berbeda dari zaman ke zaman.

Pada masa awal kemerdekaan (era Soekarno), pembudayaan nilai-nilai Pancasila dilakukan dalam bentuk pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat besar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian, pada 1 Juli 1947, diterbitkan sebuah buku yang berisi Pidato Bung Karno tentang *Lahirnya Pancasila* dengan kata pengantar dari Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI)).

Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan/pendidikan Pancasila adalah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada 1960 diterbitkan buku oleh Departemen P dan K, dengan judul *Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia (Civics)*. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang egaraa melalui pendidikan. Selain itu, terbit pula buku yang berjudul *Penetapan Tudjuh Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*, pada tahun 1961, yang dibubuhi kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur egara.

Selanjutnya di era kepemimpinan Presiden Soeharto, adanya Ketetapan MPR RI, Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetia Pancakarsa, kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Selanjutnya diperkuat dengan Tap MPR RI Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN yang mencantumkan bahwa "Pendidikan Pancasila" termasuk Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Penyempurnaan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi, Dirjen Dikti, menerbitkan SK, Nomor 25/DIKTI/KEP/1985, tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Sebelumnya, Dirjen Dikti telah mengeluarkan SK tertanggal 5 Desember 1983, Nomor 86/DIKTI/Kep/1983, tentang Pelaksanaan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Pola Seratus Jam di Perguruan Tinggi. Kemudian, dilengkapi dengan SK Kepala BP-7 Pusat tanggal 2 Januari 1984, Nomor KEP/01/BP-7/I/1984, tentang Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/Institut/Akademi Negeri dan Swasta, menyusul kemudian diterbitkan SK tanggal 13 April 1984, No. KEP-24/BP-7/IV/1984, tentang Pedoman Penyusunan Materi Khusus sesuai Bidang Ilmu yang Diasuh Fakultas/Akademi dalam Rangka Penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 100 Jam bagi Mahasiswa Baru Universitas/ Institut/Akademi Negeri dan Swasta.

Pada era Soeharto ini juga terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi, nomor 1 Tahun 1967, tentang Pedoman Penyusunan Daftar Perkuliahan, yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan

tinggi. Keberadaan mata kuliah Pancasila semakin kokoh dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 39 ditentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi harus memuat mata kuliah pendidikan Pancasila.

Akan tetapi sangat disayangkan P-4 ini merupakan strategi yang digunakan pemerintah untuk berlaku semena-semena, yaitu menekankan pada pemerintah yang otoriter, tidak boleh dikritik atau disalahkan, rakyat harus patuh kepada setiap ketetapan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga, rakyat bangkit untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto, sehingga terjadilah peristiwa reformasi tahun 1998.

Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahir Ketetapan MPR, Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), sejak itu Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan. Berikutnya, ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, yang dianggap mengurangi langkah pembudayaan Pancasila melalui pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan.

Hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 yang dilaksanakan di 81 perguruan tinggi negeri menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena perguruan tinggi merupakan wahana pembinaan calon-calon pemimpin bangsa dikemudian hari.

Abdulgani (1979) menyatakan bahwa Pancasila adalah dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya kedua hal ini, kekuasaan egara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam (yang menyebabkan kekurangtertarikan sebagian mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila). Adapun tantangan yang bersifat eksternal, antara lain adalah krisis keteladanan dari para elite politik dan maraknya gaya hidup sekelurisme di dalam masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam menggalakkan nilai-nilai Pancasila dapat dirangkum dari pidato-pidato kepresidenan Negara Indonesia, yaitu:

1. Pidato Presiden Ketiga RI, B.J. Habibie tanggal 1 Juni 2011: Habibie mengatakan kegembiraannya dengan lahirnya era reformasi dan kemajuan kehidupan demokrasi. Akan tetapi, mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk merenungkan dimana Pancasila berada pada kondisi ini? Menurutnya, bangsa Indonesia seolah-olah melupakan Pancasila, hilang begitu saja dari memori kolektif bangsa, jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Hal ini terjadi karena a) situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat Negara, regional maupun global yang telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. b) euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini. Pada masa Habibie ini Pancasila sangat dikaitkan dengan rezim Soeharto yang memosisikan Pancasila sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan sehingga tidak “dipedulikan” sama sekali.
2. Pidato Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri: Pidato Megawati cenderung menyoroti bahwa Soekarno merupakan tokoh sentral dalam merumuskan Pancasila dengan sikap Nasionalisme yang tinggi. Ia mengatakan bahwa: intisari dari substansi yang dirumuskan dalam Pancasila oleh Bung Karno, memiliki akar yang kuat dalam sejarah panjang Indonesia, tetapi nilai-nilai yang melekat di dalamnya melewati sekat-sekat subjektivitas dari sebuah peradaban dan waktu. Oleh karenanya, Pancasila dengan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945, bukan sebatas konsep ideologis, tetapi ia sekaligus menjadi sebuah konsep etis. Demikian juga, Pancasila pernah disalahtafsirkan semata-mata sebagai suatu konsep politik dalam kerangka membangun persatuan nasional. Padahal, persatuan nasional yang dimaksudkan oleh Bung Karno adalah untuk menghadapi kapitalisme dan Imperialisme sebagai penyebab dari “kerusakan yang hebat pada kemanusiaan”. Kerusakan yang hebat pada kemanusiaan tersebut pernah disampaikan oleh Bung Karno sebagai manusia yang berada di abad 20. Bayangkan, kini kita yang berada di abad 21, dan terbukti, bahwa apa yang diprediksikan ternyata sangat visioner dan jauh ke depan, kini menjadi kebenaran dan fakta sejarah. Hemat penulis isi pidato ini terlalu berlebihan, karena rumusan

Pancasila yang saat ini bukanlah ide/gagasan milik Soekarno seutuhnya, bahkan sila pertama tentang Ketuhanan dinomorlimakan oleh Soekarno. Sila-sila Pancasila yang telah dirumuskan dan disahkan sebagai dasar Negara merupakan fusi (gabungan) ide, integrasi kesepakatan para pendiri bangsa, maka janganlah hanya menonjolkan satu dari sekian banyak dari pendiri bangsa ini. Selanjutnya Megawati menambahkan keterangan berkaitan tantangan yang dihadapi bangsa pada masa pemerintahannya adalah banyaknya perdebatan bahkan pertentangan tentang pantaskah Pancasila dijadikan segala sumber dalam hidup berbangsa dan bernegara, akan tetapi tidak mampu membumikan atau menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ia mengatakan: Perjuangan agar Pancasila bukan saja menjadi bintang penunjuk, tetapi menjadi kenyataan yang membumi. Tanpa itu, kita akan terus membincangkan Pancasila, tetapi tidak mampu membumikan dan melaksanakannya hingga akhirnya kita terlelap dalam pelukan Neo-kapitalisme dan Neo-imperialisme serta terbangunnya Fundamentalisme yang saat ini menjadi ancaman besar bagi bangsa dan Negara kita. Demikian pula, Pancasila tidak akan pernah mencapai fase penerimaan sempurna secara sosial, politik, dan budaya oleh rakyatnya, justru ketika alur benang merah sejarah bangsa dalam perjalanan Pancasila dilupakan oleh bangsanya, dan dipisahkan dengan penggalinya sendiri. Inilah salah satu tugas sejarah yang harus segera diselesaikan.

3. Pidato Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono 1 Juni 2011. Pidato SBY disatu sisi membanggakan Bung Karno, akan tetapi disisi lain mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahwa masih banyak terdapat pendiri bangsa lain yang turut serta memberikan sumbangsih ide, gagasan sehingga terjadi kesepakatan tentang Pancasila. Ia mengatakan: Hari Kelahiran Pancasila merupakan sebuah refleksi kesejarahan dan kontemplasi untuk mengingat kembali gagasan cemerlang dan pemikiran besar bung Karno yang disampaikan oleh beliau pada tanggal 1 Juni 1945. Ingat, pada saat itu para *founding fathers* kita tengah merumuskan dasar-dasar dari Indonesia merdeka. Berkali-kali bung Karno mengatakan bahwa beliau bukan pembentuk atau pencipta Pancasila, melainkan penggali Pancasila, tetapi sejarah telah menorehkan tinta emas, bahwa dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan Negara sangat terkait erat dengan peran dan pemikiran besar Bung Karno. Dalam pidato SBY ia juga mengungkapkan kecemasannya tentang adanya upaya untuk mengganti Negara Pancasila dengan Negara lain, dan mendirikan Negara berdasarkan agama. Sebagaimana Ia mengatakan: Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya menangkap kegelisahan dan kecemasan banyak kalangan, melihat fenomena dan realitas kehidupan masyarakat kita termasuk alam pikiran yang melandasinya. Apa yang terjadi pada

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan. 1979. *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Abyhara, Abu Bakar. 2010. *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Admoredjo, Sudjito bin. 2009. "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila". Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30 -31 Mei s.d. 1 Juni 2009.
- Ahmadi, Asmoro. 2005. *Filsafat Umum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al Marsudi, Subandi. 2006. *Pancasila dab UUD 45 dalam Paradigma Ferormasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Amin, M. Masyhur dan Moh. Najib (ed), 1993. *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM.
- A.M. Effendy. 1995. *Falsafah Negara Pancasila*. Semarang: CV. Triadan Jaya Offest Semarang
- Anshari, Endang Saifuddin. 1983. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945-1959*. Bandung; Penerbit Pustaka.
- Ari Wilianto, Terbentuknya Republik Indonesia Serikat. 2020. Di Kompas.com <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/10/080000569/terbentuknya-republik-indonesia-serikat?page=all>
- Auliani, Palupi Annisa. 2020. Gus Dur, Islam, dan Pancasila, Artikel di Kompas.com. tersedia <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/07/07170021/gus-dur-islam-dan-pancasila?page=all>
- Bakker, Anton. 1992. *Ontologi: Metafisika Umum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bakry, Noor Ms. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Batoebara, Maria Ulfa. 2016. Dampak Moral Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bagi Manusia. *Jurnal Warta*. Edisi 49.
- Bertens, K., 1998. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Budiardjo, Miriam. 1984. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Budiyono, Kabul. 2009. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Dadang. 2005. *Iptek dan Politik*. Diposting pada 01 September 2005 16:09 di ITS News.
- Darmodihardjo, Dardji, et.al. 1991. *Santiaji Pancasila Usaha Nasiponal*, Surabaya, _____, 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 1978. *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta: PT Gita Karya, PT INTISA.
- _____, *Pengertian nilai, Norma, Moral, Etika, Pandangan Hidup*, BP.7 Pusat, Jakarta, Thn 1994/ 1996, Nomor 76.
- _____, 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Diponolo.G.S. 1975. *Ilmu Negara Jilid 1*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi: Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Emron, Ali, dkk. 1994. *Penuntun Kuliah Pancasila*, Jakarta: Alfabeta.
- Feillard, Andree. 2007. *NU Vis a Vis Negara*. Yogyakarta: LKis
- Fronidzi, Risieri. 2001. *What Is Value*. Terjemahan Cuk Ananta Wijaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gie, The Liang. 1977. *Teori-Teori Keadilan*, Yogyakarta: Super.
- Hamami, M. Abbas. 1976. *Filsafat (Suatu Pengantar Logika Formal- Filsafat Pengatahuan)*. Yogyakarta :YayasanPembinaan Fakultas Filsafat UGM
- Hamka. Urat Tunggang Pancasila. 1951. Jakarta: Keluarga.
- Hamka. 2005. *Dari Hati ke Hati Tentang Agama, Sosial-Budaya, politik*. Jakarta: Penerbit Pustaka Panjimas
- Ismaun. 1981. *Tinjauan Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia*, C.V. Carya Remaja.

- Kaelan, 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila (Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya)*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kaelan, M.S. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, Yogyakarta.
- Kaelan, Zubaidi Achmad. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. 2021. Lihat di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara>
- Koentjaraningrat. 2004. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kompas TV. Mengingat Kembali 5 Buronan KPK yang Belum Tertangkap. Rabu, 30 Desember 2020, 07:10 WIB. Tersedia: <https://www.kompas.tv/article/134103/mengingat-kembali-5-buronan-kpk-yang-belum-tertangkap?page=all>
- Kusumah, Mulyana W.. 1986. *Perspektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Lasiyo dan Yuwono. 1985. *Pengantar Ilmu Filsafat*. Yogyakarta, Liberty.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Yudi. 2015. *Revolusi Pancasila*. Bandung: Mizan.
- Lukmantoro, Triyono. 2002. *PTN dalam Hegemoni Fundalisme Pasar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Syamsuddin, dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila, Menempatkan Pancasila dalam konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.
- Machali, Imam. *Pendidikan Nasional dalam telikungan Globalisasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media & Presma F.Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Tradisi Islam, Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Madjid, Nurcholish. 2013. *Islam, Kemodernan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan
- Mahfud, M D. 2009. "Pancasila Hasil Karya dan Milik Bersama", Makalah pada Kongres Pancasila di UGM tanggal 30 Mei 2009.
- Manan, Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

- Margono, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila, Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan*, Universitas Negeri Malang.
- Martina dan Nurasih Shamadiyah. Peran Perguruan Tinggi Dalam Transfer Inovasi Teknologi Pertanian di Era MEA. Tersedia di Repository Unimal. Link: <https://repository.unimal.ac.id/2920/1/PERAN%20PERGURUAN%20TINGGI%20DALAM%20TRANSFER%20INOVASI%20TEKNOLOGI%20PERTANIAN%20DI%20ERA%20MEA.pdf>
- Miftahuddin, 2017. KH. *Wahid Hasyim Peletak Dasar Islam Nusantara*. Bandung: Marja.
- Mudhofir, Ali. 2009. *Kamus Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustaqiem. 2013. *Pendidikan Pancasila, Ideologi Negara Indonesia Dalam Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nadroh, Mardiyah Siti. 1999. *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Notonagoro. 1994. *Pancasila Secara ilmiah Populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Notosusanto, Nugroho. 1981. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Oetojo Oesman dan Alfian (Eds). 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Pasaribu, Riada Marenny. 2015. Solusi Dalam Mengatasi Masalah Pembangunan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu*. Vol.1 No.2 April 2015. 1-9.
- Paulus Wahana. 1991. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Piagam Jakarta & Wakil Indonesia Timur yang Menolak Syariat Islam”, <https://tirto.id/cq7n>
- Pranarka, AWM. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS.
- Saputra, Dedy (Peneliti kebijakan iptek LIPI). 2009. Sumber : Surabaya Post (2 Januari 2009).
- Sdajzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press
- Serafica Gischa, 2020. *Latar Belakang Terbentuknya UUD Sementara 1950*. Di Kompas.com. tersedia: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/18/140350169/latar-belakang-terbentuknya-uud-sementara-1950?page=all>

- Siswanto, Joko. 2015. *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-ihwal Pancasila*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri. 1979. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Soenarto. 1996. Peranan Industri dan Perguruan Tinggi dalam Penemuan, Inovasi dan Alih Teknologi Menuju Hak Cipta Dan Hak Paten. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Nomor 1, Tahun XV, 115-126.
- Soepiadhy, Soetanto. 2004. *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro*. Purwanggan: Kepel Press.
- Soeprapto, Bahar S, dan Arianto L., 1995. *Cita Negara Persatuan Indonesia*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Suyomukti, Nurani. 2008. *Pendidikan Berperspektif Global*. Yogyakarta: Al-Ruzz Media.
- Sulaiman, Eman. 2016. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Ash Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. 64-78.
- Surajiyo, 2020. Keunggulan Dan Ketangguhan Ideologi Pancasila. *Jurnal IKRA-ITH Humaniora* Vol. 4 No. 3, 145-155.
- Surajiyo. 2008. *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syamsuddin, M., dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila, Menempatkan Pancasila dalam konteks Keislaman dan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Total Media.
- T. Jacob. 1988. *Manusia, Ilmu dan Teknologi, Pergumulan Abadi dalam Perang dan Damai*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Tholani, Mokhammad Ishaq. 2013. Problematika Pendidikan di Indonesia (Telaah Aspek Budaya). *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, No. 2, 64-74.
- Titus, Smith, dan Nolan. 1984. *Living Issues in Philosophy*. Alih Bahasa H.M. Rasjidi. (Persoalan-persoalan Filsafat). Jakarta: Bulan Bintang.
- Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Wahid, Abdurrahman. 2001. "Nasionalisme, Tasawwuf, dan Demokratisasi", dalam Kompas tanggal 2 April 2001
- Wawancara Gus Dur, 1998, "Politik Sebagai Moral, Bukan Institusi" dalam Tabayun Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1998), hlm
- Wendi, 2020. *Peran Mahasiswa di Era Perkembangan Teknologi*. Kuliah Umum Bersama Wakapolri Komjen Pol Dr Gatot Eddy Pranomo MSi di

Universitas Riau, 11 Maret 2020. Tersedia di <https://unri.ac.id/peran-mahasiswa-di-era-perkembangan-teknologi/>

Widjaja, A.W.. 2004. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Yamin, Muhammad. 1971. *Naskah Persiapan UUD 1945*, Indonesia , Vol II dan III, Jakarta: Siguntang.

Yusuf, Slamet Effendi. 2009. Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Pancasila. Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30-32 Mei, 1 Juni 2009.

Zaini, Achmad. 2011. KH. *Abdul Wahid Hasyim Pembaharu Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan*. Jombang: Pesantren Tebuireng.

<https://mediaindonesia.com/humaniora/287190/megawati-kebijakan-iptek-berpedoman-pancasila>

TENTANG PENULIS



Wasiyem lahir di Kampung Dondong atau Desa Jentera sekarang namanya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, pada 27 Juli 1968 anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Diseh dan Ibu Waginem. Awal menempuh pendidikan di SD Negeri No. 050671 Kampung Gohor tamat tahun 1981 dilanjutkan ke SMP Negeri Stabat kemudian SMA Negeri Stabat Kabupaten Langkat. Tahun 1992 penulis menyelesaikan pendidikan dari FNGK-UDA Medan, 1996 AKTA III FIP-IKIP Medan, tahun 1999 D-IV Perawat Pendidik Jurusan Keperawatan Anak FK-USU sekarang namanya Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, pada 27 Juli 1968 anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Diseh dan Ibu Waginem. Awal menempuh pendidikan di SD Negeri No. 050671 Kampung Gohor tamat tahun 1981 dilanjutkan ke SMP Negeri Stabat kemudian SMA Negeri Stabat Kabupaten Langkat. Tahun 1992 penulis menyelesaikan pendidikan dari FNGK-UDA Medan, 1996 AKTA III FIP-IKIP Medan, 1999 D-IV Perawat Pendidik Jurusan Keperawatan Anak FK-USU Medan, 2002 FKIP dan AKTA IV UMN Medan Program Studi Bimbingan Konseling. Tahun 2012 menyelesaikan Magister Ilmu Administrasi UPMI Medan konsentrasi Administrasi Pendidikan kemudian tahun 2015 menyelesaikan D-III Kebidanan pada Akademi Kebidanan Sari Mutiara Medan, telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.

Sejak tahun 1993 penulis aktif bekerja di Akademi Kebidanan Pemko Tebing Tinggi – Sumatera Utara sebagai dosen yang sebelumnya adalah UPT Sekolah Perawat Kesehatan Tebing Tinggi, tetapi pada tahun 1998 Konversi menjadi Akademi Kebidanan Pemko Tebing Tinggi. Sampai tahun 1998 disamping sebagai guru SPK dan Instruktur Klinik PPB pada UPT SPK Tebing Tinggi penulis juga bekerja di Balai Pengobatan dr. Djohan Zen Tebing Tinggi. Selanjutnya sampai akhir Desember 2020 penulis masih bekerja di Akademi Kebidanan Pemko Tebing Tinggi sebagai dosen tetap tetapi bulan Januari sampai dengan Februari 2021 penulis bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi sebagai Analis Kesehatan pada Bidang P2P. Selanjutnya diakhir Februari 2021 sampai sekarang penulis bekerja di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan pada Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM).

Pada 18 Maret tahun 2000 menikah dengan Sabarudin, SH dan dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang selalu memberi semangat, spirit, motivasi

dan dukungan kepada penulis kapan dan dimanapun berada disaat suka maupun duka.



Ramadhani, M.Pd. Lahir di Helvetia 01 April 1992, tiga bersaudara anak ke dua dari Bapak Alimun dan Ibu Leginah. Menyelesaikan Sekolah Dasar tahun 2004 di SD Negeri 106805, MTs di MTs 1 dan MA 2 Swasta PAB Helvetia 2004-2010. Kemudian menyelesaikan Strata Satu (S1) Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tarbiyah IAIN

Sumatera Utara Medan tahun 2014. Strata Dua (S2) di Pascasarjana UNIMED prodi Pendidikan Dasar tamat tahun 2016.

Masa kuliah penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Fakultas Tarbiyah tahun 2012-2013, disinilah penulis bertemu dengan Muhammad Kaulan Karima, M.Pd yang akhirnya menjadi Suami pada tahun 2015. Saat ini dianugerahi tiga orang anak 1) Pranaja Muazzam Karim (5 tahun) dan 2) Tsania Hilya Karim (3 tahun), dan Nevia Andhara Karim (6 bulan). Pernah bekerja di di Yayasan Pendidikan Ikhwanul Muslimin II Tembung tahun 2015. Mulai tahun 2016-sekarang menjadi dosen tidak tetap di Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sumatera Utara.

Karya Ilmiah yang pernah diterbitkan: (1) Ilmu Pengetahuan Sosial: Pengantar dan Konsep Dasar (Perdana Publishing: 2019) ISBN: 978-623-7160-14-4. (2) Jurnal Ijtima'iyah Jurusan Pendidikan IPS FITK UIN SU: "Peran Pendidikan Dalam Mewujudkan Generasi Emas Indonesia Yang Bermartabat". Volume 1, No. 1, 2017. (3) Ittihad Jurnal Pendidikan, Vol. II No. 1, 2018. *Permasalahan Pembelajaran IPS dan Strategi Jitu Pemecahannya*. ISSN: 2549-9238, E-ISSN:2580-4441. (4) Proceeding International Conference on Contemporary Islamic Studies (InConCIS) 2020. *Effective Communication: Effort To Improve The Students Character*. ISBN: 978-623-93575-2-8. (5) Buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Upaya Mewujudkan *Good Citizenship*. (Editor). Merdeka Kreasi: Medan. (Anggota IKAPI). ISBN. 978-623-6198-06-3/2021

TENTANG EDITOR



Dr. Muhammad Kaulan Karima, M.Pd. lahir di Desa Gelam, Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 23 Juli 1988, anak bungsu dari enam orang bersaudara dari pasangan Bapak H. Abd. Rahman dan Hj. Latifah Hanim. Mengawali pendidikan di SDN. 102072 Bandar Khalipah dan sekaligus MDTA Al Washliyah Bandar Khalipah tamat tahun 2000.

Setelah itu melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Modern Nurul Hakim Tembung tahun 2000-2006.

Pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN-SU Medan tahun 2006 pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan lulus sebagai Wisudawan Terbaik sekaligus mewakili seluruh wisudawan menyampaikan sambutan pada November 2010, selama mengikuti perkuliahan juga aktif berorganisasi di HMI Komisariat Tarbiyah pada tahun 2007-2008. Tahun 2011 Melanjutkan Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana UNIMED Prodi Pendidikan Dasar konsentrasi IPS tamat tahun 2013. Menyelesaikan Strata Tiga (S3) tahun 2021 pada PPs UNIMED Prodi Pendidikan Dasar.

Menikah dengan Ramadhani, M.Pd. tanggal 05 April 2015 saat ini dianugerahi tiga orang anak: Pranaja Muazzam Karim (5 tahun) dan Tsania Hilya Karim (3 tahun), dan Nevia Andhara Karim (6 bulan). Mulai tahun 2011-sekarang aktif sebagai Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN SU Medan. Saat ini sebagai Ketua I di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Ittihadiyah Labuhanbatu Utara (STIT-AILU). Serta sebagai Ketua Umum DPW Barisan Muda Al Ittihadiyah Sumatera Utara periode 2017-2022.

Karya ilmiah Buku, Prosiding, dan Jurnal yang telah dihasilkan antara lain: (1) Buku Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling: Konsep dan Teori (Kencana, 2019) ISBN. 978-623-218-436-7. (2) Buku Ilmu Pengetahuan Sosial: Pengantar dan Konsep Dasar (Perdana Publishing: 2019) ISBN: 978-623-7160-14-4. (3) Buku Sosiologi Pendidikan (Perdana Publishing: 2016) ISBN: 978-602-6462-10-7. (4) Prosiding: *International Conference on Islamic Educational Management*. Judul: *Decision Making: Effective Basic Leadership*. ISBN: 978-623-93575-1-1. (UIN SU Press dan Perdana Publishing, 2020). (5) Prosiding “12th International Workshop and Conference of Asean Studies in